

Hubungan Faktor Pekerjaan, Pendapatan Keluarga, dan Dukungan Tokoh Masyarakat dengan Kepemilikan Jamban

The Influence of Employment, Family Income, and Support from Community Figures on Toilet Ownership

Yulizar¹, Heru Santosa², Nurmaini³, Sri Malem Indirawati⁴, Bayu Anggileo Pramesona⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

⁵Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history

Received date
13 Apr 2022

Revised date
18 Apr 2022

Accepted date
22 Apr 2022

Keywords:

Community figures;
Employment;
Family income;
Toilet ownership.

ABSTRACT/ ABSTRAK

BPS data in 2017, around 25 million Indonesians still defecate openly. Many factors influence the ownership of latrines, but research related to factors of employment, family monthly income, and support from community leaders for latrine ownership in Aceh Barat Daya Regency is still rarely done. This study aimed to determine the relationship between employment, family monthly income, and support from community leaders on latrine ownership. This cross-sectional study with a sample of 100 respondents who were randomly selected and scattered in sub-districts was conducted in the urban area of Aceh Barat Daya Regency, Nanggroe Aceh Darussalam province. Questionnaires related to respondent characteristics, employment, family monthly income, and support from community leaders, as well as latrine ownership, were collected directly by the researchers through face-to-face interviews from September-October 2021. The statistical tests used were Chi-Square and Mann-Whitney with a significance level of $p\text{-value} < 0.05$. The results showed that there was no significant relationship between employment ($p\text{-value} = 0.604$), family monthly income ($p\text{-value} = 0.118$), and support from community leaders ($p\text{-value} = 0.615$) on latrine ownership. In conclusion, there is no relationship between employment factors, family monthly income, and support from community leaders for latrine ownership in Aceh Barat Daya District, Nanggroe Aceh Darussalam province. Village to district governments can offer policies that ensure that every house, owned or rented, must be equipped with proper sanitation facilities. This program can work well if it involves the community, local stakeholders, and landowners.

Kata kunci:

Tokoh masyarakat;
Pekerjaan;
Pendapatan keluarga;
Kepemilikan jamban.

Data BPS tahun 2017, sekitar 25 juta penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepemilikan jamban, namun penelitian terkait faktor pekerjaan, pendapatan bulanan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat terhadap kepemilikan jamban di Kabupaten Aceh Barat Daya masih jarang dilakukan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan pekerjaan, pendapatan bulanan keluarga dan dukungan tokoh masyarakat terhadap kepemilikan jamban. Penelitian *cross-sectional study* dengan sampel 100 responden dipilih secara acak dan tersebar pada kecamatan ini dilaksanakan di wilayah perkotaan Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kuesioner terkait karakteristik responden, pekerjaan, penghasilan bulanan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat, serta kepemilikan jamban didapatkan langsung oleh peneliti secara *face-to-face interview* mulai November-Desember 2021. Uji statistik yang digunakan adalah *Chi-Square* dan *Mann-Whitney* dengan tingkat signifikansi $p\text{-value} < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan ($p\text{-value} = 0,604$), penghasilan bulanan keluarga ($p\text{-value} = 0,118$), dan dukungan tokoh masyarakat ($p\text{-value} = 0,615$) terhadap kepemilikan jamban. Kesimpulan tidak terdapat hubungan antara faktor pekerjaan, penghasilan bulanan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat terhadap kepemilikan jamban di Kabupaten Aceh Barat Daya, Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah desa hingga kabupaten hendaknya dapat mempromosikan kebijakan yang memastikan bahwa setiap rumah, yang dimiliki atau disewa, harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi layak. Program ini dapat berjalan dengan baik jika melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan setempat, dan pemilik tanah.

Corresponding Author:

Yulizar

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email: yuli_88_07@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Diperkirakan 673 juta orang pada tahun 2017 masih buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, bukan di jamban atau toilet. BABS berdampak pada kesehatan anak-anak dan berkontribusi pada sejumlah besar kematian dini. Hingga saat ini penyakit menular telah menjadi salah satu hal yang menyebabkan morbiditas tertinggi pada masyarakat, terutama karena penyakit diare seperti kolera dan disentri. Morbiditas dan mortalitas yang berlebihan yang disebabkan oleh penyakit sebagian besar masih dapat dihindari, bila intervensi yang tepat diterapkan. Pengalaman telah menunjukkan bahwa ketika intervensi ini dilaksanakan secara tepat waktu dan terkoordinasi, kematian dan penyakit berkurang secara substansial. Faktor risiko yang mendorong penyakit menular kelangkaan air bersih, sanitasi yang buruk (M. Atunyambe, 2011).

Masalah sanitasi merupakan salah satu perhatian utama dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang akan menimbulkan hal-hal yang merugikan perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan tubuh (Ditjen PP dan PL, 2011). Mengenai buang air besar sembarangan, Indonesia menduduki peringkat kedua atau dalam praktiknya di bawah India, dengan lebih dari 51 juta penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan (UNICEF, 2015). Lebih dari 800 juta orang buang air besar di tempat terbuka daripada menggunakan jamban walaupun perkembangan angka kematian secara global akibat penyakit diare menurun, akan tetapi faktor air dan sanitasi yang buruk berpengaruh besar pada ratusan ribu kematian anak, serta tingginya angka diare, malnutrisi akibat diare dan stunting pada anak hingga saat ini (Meyer, 2019).

Hasil studi tahun 2006 oleh *Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP)* menunjukkan bahwa 47% penduduk masih buang air besar di sungai, kolam, kebun, dan tempat terbuka lainnya. Pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* terkait akses sanitasi layak dan air minum aman pada tahun 2015 adalah 62,41% dan 68,87%, sedangkan pencapaian akses sanitasi layak di Indonesia berdasarkan data BPS dan Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2012 sebesar 57,35%, sedangkan akses air minum aman baru mencapai 58,05%. Berdasarkan analisis BPS tahun 2017, diperkirakan ada 25 juta penduduk Indonesia yang masih buang air besar sembarangan, jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara

dengan penduduk terbanyak ke-3 yang melakukan buang air besar sembarangan setelah India dan Nigeria (Badan Pusat Statistik (BPS), 2017).

Sanitasi dasar merupakan persyaratan kesehatan lingkungan minimal yang harus dimiliki setiap keluarga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Sanitasi dasar terdiri dari penyediaan air bersih, pembuangan tinja, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) disebutkan bahwa dalam rangka penguatan upaya perilaku hidup bersih dan sehat, penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta akses terhadap air minum dan sanitasi dasar, perlu dilaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Aceh Barat Daya adalah kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 kecamatan, 152 gampong (desa), dan 34.080 Kepala Keluarga. Selain itu, Kabupaten Aceh Barat Daya juga memiliki 13 pusat kesehatan masyarakat (Puskemas) yang tersebar di 9 kecamatan. Menurut data STBM Smart hingga 2020, di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat 5 desa (3,29%) dari total 152 desa yang sudah *open defecation free* (ODF). Sebaran desa yang telah berhasil *open defecation free* (ODF) di kecamatan Blang Pidie memiliki satu desa terverifikasi yaitu Desa Kuta Tinggi, dan 4 desa lainnya berada di kecamatan Susoh yaitu desa Durian Jangek, Palak Hilir, Pinang, dan Rumah Dua Lantai (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, hanya 36,3% rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki akses sanitasi layak. Kabupaten Aceh Barat Daya juga masuk dalam 5 besar kabupaten dengan persentase rumah tangga bebas buang air besar sembarangan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Ada 31,75% rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki sepeda motor pribadi tetapi tidak memiliki jamban keluarga. Tidak ada rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak memiliki jamban dan sepeda motor secara bersamaan. Asumsinya penyebab buang air besar sembarangan terkait dengan keterbatasan air di Kabupaten Aceh Barat Daya, namun berdasarkan analisis data BPS ini, terdapat 14% rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki air tersedia tetapi tidak memiliki jamban pribadi (Badan Pusat Statistik (BPS), 2017).

Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya kepemilikan jamban sehingga

menyebabkan masyarakat masih melakukan BABS. Namun, penelitian terkait hubungan faktor pekerjaan, pendapatan bulanan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat terhadap kepemilikan jamban di Kabupaten Aceh Barat Daya masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan faktor pekerjaan, penghasilan bulanan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat terhadap kepemilikan jamban di Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi NAD tahun 2021.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional study* dengan sampel sebanyak 100 orang responden yang dipilih secara acak dan tersebar pada kecamatan yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Responden yang memiliki penghasilan perbulan \geq Rp.2.000.000 serta memiliki rumah pribadi yang permanen direkrut sebagai sampel pada penelitian ini. Kuesioner terkait karakteristik responden, variabel independen berupa pekerjaan, penghasilan bulanan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat, serta variabel dependen yaitu kepemilikan jamban dikumpulkan langsung oleh peneliti secara *face-to-face interview* mulai November-Desember 2021. Analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi baik data karakteristik responden maupun variabel yang diteliti. Sedangkan analisis bivariat digunakan uji statistik Chi-Square dan *NPAR Test (Mann Withney Test)*, hal ini dikarenakan data sampel tersebut memiliki sebaran tidak normal. *Ethical clearance* diperoleh dari Komite Etik Penelitian Stikes Medika Teuku Umar, Aceh Barat (No.187/stikes-mtu/X/2021).

HASIL

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	n	%
Umur		
18-34 tahun	65	65,0
35-50 tahun	31	31,0
> 50 tahun	4	4,0
Jenis Kelamin		
Laki-laki	69	69,0
Perempuan	31	31,0
Pekerjaan		
ASN	26	26,0
Karyawan Swasta	16	16,0
Guru Honorer	7	7,0
Mahasiswa	16	16,0
Petani	11	13,6
Wiraswasta	7	7,0
Pedagang	3	3,0
Ibu Rumah Tangga	3	3,0
Lainnya	10	10,0
Tingkat Pendidikan		
S2/S3	12	12,0
DIII/S1	68	68,0
SMA/MA	14	14,0
SMP/MTS	2	2,0
SD/MI	3	3,0
Tidak Sekolah	1	1,0
Agama		
Islam	100	100,0
Non Islam	0	0
Kepemilikan Jamban		
Ya	72	72,0
Tidak	28	28,0

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa mayoritas (69%) responden berjenis kelamin laki-laki dan sisanya (31%) berjenis kelamin perempuan, berusia antara 18-34 tahun (65,0%), lebih dari seperempat (26%) responden berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lebih dari dua pertiga (68%) responden berpendidikan DIII/S1. Selain itu, seluruh (100%) responden beragama Islam. Adapun hasil analisis variabel kepemilikan jamban, diketahui bahwa sebagian besar (72%) responden memiliki jamban di rumah pribadi masing-masing.

Tabel 2. Hasil Analisis Univariat Pendapatan Bulanan Keluarga dan Dukungan Tokoh Masyarakat

Variabel	SD	Mean (Rp)	Median (Rp)	Min (Rp)	Max (Rp)
Pendapatan Bulanan Keluarga	1,508,586	3.315.000	3.000.000	2.000.000	8.000.000
Dukungan Tokoh Masyarakat	31,83	59,05	50,00	10	100

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 didapatkan bahwa rata-rata jumlah pendapatan responden sebesar Rp.3.315.000 dengan standar deviasi penghasilan responden Rp.1.508,586.

Sedangkan Skor dukungan tokoh masyarakat memiliki nilai rata-rata sebesar 59,05 dengan nilai SD=31,83.

Tabel 3. Hasil Analisis Hubungan Pekerjaan, Pendapatan Bulanan Keluarga, dan Dukungan Tokoh Masyarakat dengan Kepemilikan Jamban

Variabel	Normalitas Data	p-value
Pekerjaan Jumlah	0,0020***	0,604*
Pendapatan Keluarga	0,0010	0,118**
Dukungan Tokoh Masyarakat	0,0013	0,615**

*Uji Chi square, **Uji Mann-Whitney, ***Uji Kolmogorov Smirnov

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa dari uji *Chi-Square*, hasil uji korelasi menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan kepemilikan jamban ($p\text{-value}=0,604$). Hasil uji *Mann-Whitney* juga menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara pendapatan bulanan keluarga ($p\text{-value}=0,118$) dan dukungan tokoh masyarakat ($p\text{-value}=0,615$) terhadap kepemilikan jamban pada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

PEMBAHASAN

Faktor Pekerjaan dengan Kepemilikan Jamban

Pada hasil uji *Chi-Square* terkait hubungan pekerjaan dengan kepemilikan jamban didapatkan nilai signifikan 0,604 yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara pekerjaan dengan kepemilikan jamban pada keluarga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di Majalengka yang menunjukkan nilai $p\text{-value}=0,570$ yang artinya tidak ada hubungan antara pekerjaan kepala keluarga dengan kepemilikan jamban keluarga (Lestari, 2015). Karakteristik pekerjaan seseorang dapat mencerminkan pendapatan, status sosial, pendidikan, status sosial ekonomi, risiko cedera atau gangguan kesehatan pada suatu kelompok penduduk. Pekerjaan juga merupakan penentu risiko dan penentu paparan yang spesifik pada bidang pekerjaan tertentu dan merupakan prediktor status dan kondisi kesehatan di mana suatu populasi bekerja (Herlianto, 2006). Hasil studi ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor pekerjaan tidak mempengaruhi kepemilikan jamban, hal ini karena kurangnya kesadaran atau kemauan untuk memiliki jamban keluarga (Siregar, 2018).

Menurut asumsi peneliti, dorongan terkait kepemilikan jamban dalam sebuah rumah tak hanya ditentukan oleh status pekerjaan yang mana status pekerjaan mencerminkan status sosial masyarakat dalam kelompoknya. Semakin bagus dan tenar seseorang dalam pekerjaan

seharusnya memang semakin baik pemahaman seseorang tersebut terkait pentingnya memiliki jamban di rumah. Namun, ada tidaknya jamban dalam sebuah rumah didorong dari faktor kesadaran perilaku dan pemahaman mengenai pentingnya memiliki jamban dalam sebuah rumah.

Pendapatan Bulanan Keluarga dengan Kepemilikan Jamban

Hasil analisis mengenai hubungan pendapatan bulanan keluarga dengan kepemilikan jamban pada penelitian ini menunjukkan $p\text{-value}>0,05$ yang artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara jumlah pendapatan bulanan keluarga dengan kepemilikan jamban. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari (2015) yang menemukan bahwa pendapatan tidak berkaitan erat dengan kepemilikan jamban dalam sebuah rumah tangga. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan di India pada masyarakat perkotaan di mana penyebab utama buang air sembarangan adalah akses ke fasilitas air dan sanitasi (Wankhade K, 2015), serta penelitian lain yang menemukan fakta bahwa faktor sosial seperti kasta, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga justru mempengaruhi kepemilikan jamban (Shakya HB, Christakis NA, & Fowler JH, 2015). Di India, karena tingkat pendapatan yang rendah, penggunaan jamban bersama merupakan kebiasaan yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat di wilayah perkotaan dengan perbandingan lebih dari 16 rumah tangga menggunakan jamban umum yang dibangun untuk keperluan bersama (Busienei, Ogendi, & Mokuu, 2019).

Membangun jamban di tingkat rumah tangga sangat penting untuk menghilangkan aktivitas BABS. Intervensi yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI selalu terfokus pada determinan tingkat individu seperti sikap dan perilaku, daripada mempertimbangkan semua determinan sosial yang mungkin terkait dengan kepemilikan jamban (Jain, Fernald, Smith, & Subramanian, 2019). Jamban umum yang dibangun oleh pemerintah seringkali sangat tidak memadai dan berkualitas rendah ditambah lagi setelah diberikan tidak ada pemeliharaan (Abubakar IR, 2018). Penyediaan toilet umum dapat sedikit mengurangi tetapi tidak mengakhiri masalah BABS pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal yang menarik dari data kepemilikan jamban adalah ada masyarakat yang sudah memiliki jamban tetapi masih

mempraktekkan buang air besar sembarangan (4,7%) karena faktor kelaziman yang sudah dilakukan dan biasanya mereka tinggal di dekat sungai (Yulyani, Febriani, Shaharuddin MS, & Hermawan, 2021).

Pendapatan keluarga juga tidak menjamin akan adanya jamban dalam sebuah keluarga jika tidak disertai dengan adanya pemahaman yang baik dan kesadaran perilaku tiap anggota keluarga. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Barat Daya masih ditemukan keluarga yang memiliki pendapatan menengah dan menengah ke atas yang tidak memiliki jamban pribadi.

Dukungan Tokoh Masyarakat dengan Kepemilikan Jamban

Hasil analisis menggunakan Uji N-PAR (*Mann-Whitney*) untuk melihat hubungan antara dukungan tokoh masyarakat dengan kepemilikan jamban didapatkan $p\text{-value}=0,604$ ($p\text{-value}>0,05$) yang artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara dukungan tokoh masyarakat dengan kepemilikan jamban. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tokoh masyarakat dalam mendukung penghentian BABS masih kurang (68,1%). Hasil analisis multivariat dari penelitian sebelumnya menunjukkan tidak ada pengaruh peran tokoh masyarakat terhadap kepemilikan jamban. Hasil uji statistik diperoleh nilai $p\text{-value}=0,794$ yang artinya BAB sembarangan tidak disebabkan oleh kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat (Barliansyah, Efendi, & Syamsul, 2019). Penelitian lain juga menemukan nilai signifikansi sebesar 1.000 atau $>0,05$ antara variabel sikap dengan kepemilikan jamban keluarga. Tidak adanya hubungan dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwa masih banyak responden dengan sikap baik namun tidak memiliki jamban sehat (Samosir, *et al.*, 2019).

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan tokoh masyarakat dan kepemilikan jamban sehat rumah tangga. Tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh dapat menjadi panutan dan teladan untuk diikuti dalam segala sikap tindakan oleh kepala keluarga dan

anggota keluarga lainnya dalam kelompok masyarakat di daerah setempat karena setiap tindakan dan perkataan (Mathofani, Annisa, & Metalia, 2020). Hal ini kemungkinan disebabkan perbedaan karakter masyarakat dan besar kecilnya upaya tokoh masyarakat dalam mempengaruhi perilaku warganya.

Menurut asumsi peneliti, hal ini bisa terjadi karena keinginan setiap rumah tangga untuk memiliki jamban sehat di wilayah tersebut bukan semata-mata karena faktor dukungan tokoh masyarakat, tetapi karena kegiatan buang air sembarang masih menjadi kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini didukung penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa kepemilikan jamban sehat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan jamban (Larosa, 2018). Pada dasarnya setiap orang akan membutuhkan jamban sebagai tempat buang air besar setiap saat. Maka kebutuhan jamban yang memenuhi syarat menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan penggunaan jamban yang tidak memenuhi syarat meskipun memiliki jamban akan berdampak pada kesehatan lingkungan dan kesehatan keluarga yang tinggal di sekitarnya (Larosa, 2018).

SIMPULAN

Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara faktor pekerjaan, penghasilan bulanan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat dengan kepemilikan jamban di Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Nanggore Aceh Darussalam tahun 2021. Pemerintah desa hingga kabupaten hendaknya dapat mempromosikan kebijakan yang memastikan bahwa setiap rumah, yang dimiliki atau disewa, harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi layak. Program ini dapat berjalan dengan baik jika melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan setempat, dan pemilik tanah. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menentukan sejauh mana komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan akses sanitasi yang layak sehingga wilayah dengan *open defecation free* dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar IR. (2018). Exploring the determinants of open defecation in Nigeria using demographic and health survey data. *Science of the Total Environment*, 637(8), 1455-1465.

<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.104>
Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Analisis Data BPS Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017*. Aceh Barat Daya: BPS Aceh Barat Daya.

- Barliansyah, B., Efendi, I., & Syamsul, D. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Stop Buang Air Besar Sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Simeulue Barat. *Jurnal Kesehatan Ceadum*, 1(4), 21-30. <https://jkc.puskadokesa.com/jkc/article/view/32>
- Busienei, P., Ogendi, G., & Mokua, M. (2019). Open Defecation Practices in Lodwar, Kenya: A Mixed-Methods Research. *Environmental Health Insights* 13, 1-13. <https://doi.org/10.1177/1178630219828370>
- Ditjen PP dan PL. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)*. Jakarta.
- Herlianto. (2006). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jamban keluarga di Desa di Wilayah kerja Puskesmas Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan 2006. [Skripsi]. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Jain, A., Fernald, L., Smith, K. R., & Subramanian, S. V. (2019). Sanitation in Rural India: Exploring the Associations between Dwelling Space and Household Latrine Ownership. *International journal of environmental research and public health*, 16(5), 734. <https://doi.org/10.3390/ijerph16050734>
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Data STBM-Smart*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Larosa, W. (2018). Faktor-faktor yang berpengaruh perilaku masyarakat dalam penggunaan jamban di wilayah Puskesmas Aek Parombunan Kota Sibolga. [Skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Lestari, S. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jamban keluarga. *Jurnal Kesehatan*, 6(2), 667-676. <https://doi.org/10.38165/jk.v6i2.146>
- M. Atunyanbe, d. (2011). *Bencana tanah longsor di Uganda timur: sanitasi situasi air, sanitasi dan kebersihan di kamp Bulucheke, distrik Bududa*. Pusat Bioma, <http://www.ehjournal.net/content/10/1/38>
- Mathofani, P. E., Annisa, & Metalia, R. P. (2020). Determinan Pemanfaatan Jamban Keluarga Pada Keluarga. *Faletahan Health Journal*, 7(1), 68-74. <https://doi.org/10.33746/fhj.v7i1.118>
- Meyer, J., et.al. (2019). Long-term impact of a community-led sanitation campaign in India, 2005-2016. *Bull World Health Organization*, 97, 523-553A.doi: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6653825/>
- Samosir, K., et al., (2019). Peranan Perilaku Tokoh Masyarakat Terhadap Kepemilikan Jamban Sehat di Tanjung Pinang. *Karya Tulis Ilmiah*. Bangka Belitung: Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
- Shakya HB, Christakis NA, & Fowler JH. (2015). Social network predictors of latrine ownership. *Social Science & Medicine*, 129-138. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.03.009>
- Siregar, L. M. B. (2018). Hubungan Pendapatan, Pendidikan, dan Pengetahuan dengan Ketersediaan Jamban Keluarga di Deaa Lawe Pengulu Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo Tahun 2018. *Karya Tulis Ilmiah*. Medan: Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
- UNICEF. (2015). *Kemajuan dalam air minum dan sanitasi: Pembaharuan Program Pemantauan Bersama 2014*. Jenewa UNICEF.
- Wankhade K. (2015). Urban sanitation in India: key shifts in the national policy frame. *Environmentalist and Urban*, 27(2), 555-572. <https://doi.org/10.1177/0956247814567058>
- Yulyani, V., Febriani, C. A., Shahrudin MS, & Hermawan, D. (2021). Patterns and Determinants of Open Defecation among Urban People *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 16(1), 45-50. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v16i1.3295>